



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PERANAN DINAS TENAGA KERJA DALAM MELINDUNGI HAK
PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
DAN MENGUNDURKAN DIRI DI KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program

Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

OGIE NARAWANGSA RAMADHAN

NPM. 221003742019368

SEMARANG

2026



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**“PERANAN DINAS TENAGA KERJA DALAM MELINDUNGI HAK
PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
DAN MENGUNDURKAN DIRI DI KABUPATEN PATI”**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

OGIE NARAWANGSA RAMADHAN
NPM. 221003742019368

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,**

**Abdul Kholiq, S.H., M.H
NUPTK. 1644743644130112**

Anggota,

**Dr. Totok Tumangkar, SH., M.Hum
NUPTK. 143373763813031**

Anggota,

**Ridho Pakina, SH., MH
NUPTK. 81457416422300073**

**Mengetahui,
Dekan,**

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum
NUPTK. 0625046301.**

**SEMARANG
2026**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAIN	xii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian	6
1. Kegunaan Teoretis	6
2. Kegunaan Praktis	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum.....	9
1. Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	9
2. Sifat Dinamis dan Titik Konflik dalam Hubungan Industrial.....	11
3. Landasan Yuridis Hak Pekerja yang Mengundurkan Diri (<i>Resign</i>)	12
4. Komponen Hak Kompensasi yang Wajib Diberikan.....	14
B. Tinjauan Khusus	15
1. Peran Kelembagaan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pati	15
2. Fungsi Preventif: Pembinaan Kepatuhan Regulasi Perusahaan.....	16
3. Fungsi Reaktif: Mediasi dan Kualitas Resolusi Konflik.....	17
4. Kepastian Hukum dan Hambatan Implementasi Struktural.....	19

BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Tipe Penelitian.....	21
B. Spesifikasi Penelitian.....	21
C. Sumber Data	22
1. Data Primer	22
2. Data Sekunder.....	23
D. Metode Pengumpulan Data	24
E. Metode Penyajian Data.....	25
F. Metode Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	27
A. Peranan Dinas Tenaga Kerja dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena <i>Resign</i> di Kabupaten Pati Dan Cara Mengatasinya.....	27
B. Kendala yang Dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dalam Melindungi Hak- Hak Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena <i>Resign</i> di Kabupaten Pati.....	40
BAB PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR LAIN

Tabel 4.1 Data Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Pati (Tahun 2022 - 2024)	30
Tabel 4.2 Klasifikasi Pelanggaran Hak Pekerja <i>Resign</i> di Kabupaten Pati Berdasarkan Data Pengaduan	34
Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Dokumen Perselisihan Hubungan Industrial Kasus <i>Resign</i> di Kabupaten Pati (Periode 2023-2024)	41

Singkatan	Kepanjangan
ABK	Analisis Beban Kerja
Anjab	Analisis Jabatan
BPS	Badan Pusat Statistik
Disnaker	Dinas Tenaga Kerja
DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LKj-IP	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PB	Perjanjian Bersama
PHI	Perselisihan Hubungan Industrial
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PKB	Perjanjian Kerja Bersama
PP	Peraturan Perusahaan
Renstra	Rencana Strategis
RKA	Rencana Kerja Anggaran
SDM	Sumber Daya Manusia
SOTK	Struktur Organisasi dan Tata Kerja
UP	Uang Pesangon
UPH	Uang Penggantian Hak
UPMK	Uang Penghargaan Masa Kerja
WLK	Wajib Laporkan Ketenagakerjaan

ABSTRAK

Pekerja yang mengundurkan diri (*resign*) di Kabupaten Pati seringkali menghadapi kendala dalam memperoleh hak-hak normatifnya, seperti Uang Penggantian Hak (UPH) dan Uang Pisah, akibat ketidakjelasan regulasi internal perusahaan dan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, yang memicu tingginya perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pati dalam melindungi hak pekerja *resign* serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang menggabungkan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dengan studi lapangan melalui wawancara dan analisis dokumen resmi Disnaker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Disnaker masih bersifat administratif-pasif, di mana fungsi mediasi lebih dominan daripada pencegahan, dan seringkali menghasilkan perjanjian bersama yang nilainya di bawah standar normatif akibat ketiadaan aturan Uang Pisah yang jelas dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Kendala utama yang dihadapi meliputi kekosongan hukum pada regulasi internal perusahaan yang bersifat delegatif, keterbatasan jumlah mediator dan anggaran pengawasan, serta rendahnya kepatuhan prosedur administrasi oleh pekerja dan resistensi pengusaha. Disimpulkan bahwa perlindungan hak pekerja *resign* di Kabupaten Pati belum efektif menjamin kepastian hukum, sehingga diperlukan optimalisasi verifikasi PP/PKB oleh Disnaker dan penetapan regulasi nasional yang lebih tegas mengenai standar perhitungan Uang Pisah.

Kata Kunci: Dinas Tenaga Kerja, Perlindungan Pekerja, *Resign*, Uang Pisah, Kabupaten Pati.